

Pendidikan Tinggi terhadap Mobilitas Sosial di Indonesia

Abstrak.

Pendidikan tinggi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional sekaligus instrumen untuk mendorong mobilitas sosial vertikal. Akses pendidikan tinggi yang merata dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki status sosial, namun realitas di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan akibat faktor sosial-ekonomi, geografis, dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan tinggi berperan signifikan dalam membuka kesempatan mobilitas sosial, namun perannya dipengaruhi kuat oleh latar belakang keluarga dan kondisi ekonomi. Konsep Inequality of Educational Opportunity (IEO) dan Inequality of Social Opportunity (ISO) dari Boudon (1974) relevan digunakan untuk melihat fenomena ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendidikan tinggi mampu meningkatkan mobilitas sosial hanya jika didukung kebijakan pemerataan akses, subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi.

Kata kunci: Pendidikan Tinggi, Mobilitas Sosial, Kesenjangan Sosial, Pembangunan Nasional

Abstract

Higher education is an important factor in national development as well as an instrument for encouraging vertical social mobility. Equal access to higher education can open up opportunities for people to improve their social status, but the reality in Indonesia shows that there are still gaps due to socio-economic, geographical and cultural factors. This research aims to analyze the relationship between higher education and social mobility in Indonesia using descriptive qualitative methods based on literature study. The results of the analysis show that higher education plays a significant role in opening up opportunities for social mobility, but its role is strongly influenced by family background and economic conditions. The concepts of Inequality of Educational Opportunity (IEO) and Inequality of Social Opportunity (ISO) from Boudon (1974) are relevant to use to see this phenomenon. This article concludes that higher education is able to increase social mobility only if it is supported by policies of equal access, education subsidies, and improving the quality of higher education.

Keywords: Higher Education, Social Mobility, Social Inequality, National Development

How to Cite: Serli Handayani. 2025. Peran Masyarakat terhadap Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal of Social Studies and Social Science (JS4)*, DOI: ...



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. © 2022 by author.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks pembangunan modern, pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan daya saing individu dan kolektif bangsa. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial, yaitu mekanisme yang memungkinkan individu berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lain yang lebih tinggi (Becker, 1993). Hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial telah lama menjadi perhatian para ahli. Teori human capital menekankan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya memperoleh pekerjaan bergaji tinggi, yang pada akhirnya mendorong mobilitas sosial vertikal (Psacharopoulos & Patrinos, 2004). Namun, teori sosiologis menyoroti bahwa pendidikan bukanlah faktor tunggal. Latar belakang keluarga, status ekonomi, dan kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap tercapainya mobilitas sosial (Coleman et al., 1966).

Di Indonesia, ketimpangan akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar. Data BPS (2017) menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi hanya 20,89%, jauh lebih rendah dibandingkan pendidikan dasar dan menengah. Rendahnya angka ini menandakan adanya hambatan struktural yang signifikan, termasuk biaya kuliah yang tinggi, distribusi perguruan tinggi yang tidak

merata, serta disparitas sosial-ekonomi. Penelitian internasional juga memperlihatkan pola serupa. Di negara berkembang, akses pendidikan tinggi seringkali hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, sehingga memperlebar kesenjangan sosial (Mok, 2016). Di sisi lain, negara-negara maju yang berhasil meminimalisasi ketimpangan justru mampu memanfaatkan pendidikan tinggi sebagai motor penggerak mobilitas sosial yang lebih merata (OECD, 2019).

Konsep Inequality of Educational Opportunity (IEO) dan Inequality of Social Opportunity (ISO) yang dikemukakan Boudon (1974) relevan untuk menganalisis konteks Indonesia. IEO menyoroti kesenjangan capaian pendidikan akibat latar belakang sosial, sementara ISO menekankan ketimpangan capaian status sosial akibat latar belakang keluarga. Kedua konsep ini menjelaskan bahwa pendidikan tinggi tidak sepenuhnya menjamin mobilitas sosial jika ketimpangan struktural masih tinggi. Penelitian-penelitian di Indonesia (Pattinasarany, 2012) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi mampu meningkatkan peluang mobilitas sosial. Namun, peluang ini lebih besar pada kelompok yang sudah memiliki modal ekonomi dibandingkan kelompok miskin. Artinya, pendidikan tinggi cenderung mereproduksi kesenjangan sosial apabila aksesnya tidak diperluas.

Globalisasi juga mengubah peran pendidikan tinggi. Brown, Lauder, & Ashton (2011) menyatakan bahwa ijazah pendidikan tinggi kini tidak lagi menjamin status sosial atau pekerjaan bergaji tinggi. Persaingan global menuntut keterampilan tambahan, seperti kemampuan teknologi, kreativitas, dan komunikasi lintas budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar benar-benar menjadi instrumen mobilitas sosial. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan menganalisis peran pendidikan tinggi terhadap mobilitas sosial di Indonesia. Fokus utama kajian adalah bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi, geografis, dan kultural memengaruhi hubungan tersebut, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran pendidikan tinggi dalam mendorong mobilitas sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research (studi kepustakaan). Metode ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis konsep teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hubungan pendidikan tinggi dengan mobilitas sosial. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, laporan resmi pemerintah (BPS, Kemendikbud, OECD), serta artikel penelitian. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari literatur. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai data dari penelitian terdahulu untuk memastikan konsistensi temuan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang peran pendidikan tinggi dalam memengaruhi mobilitas sosial di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Tinggi sebagai Jalur Mobilitas Sosial

Pendidikan tinggi sejak lama dipandang sebagai jalur strategis bagi mobilitas sosial vertikal. Dalam konteks pembangunan modern, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga menciptakan peluang bagi individu untuk memperbaiki status sosial-ekonominya (Becker, 1993). Sejak tahun 1950-an, masyarakat memandang pendidikan tinggi sebagai instrumen utama untuk keluar dari kemiskinan dan memperoleh kedudukan sosial yang lebih baik (Burlutskaia, 2014). Pandangan ini sejalan dengan teori human capital yang menyatakan bahwa investasi pendidikan memberikan keuntungan jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat. OECD (2019) menunjukkan bahwa rata-rata return on investment (ROI) pendidikan tinggi mencapai 35,9%, yang berarti individu dengan gelar sarjana memperoleh keuntungan ekonomi lebih besar dibanding mereka yang hanya memiliki pendidikan menengah. Dengan demikian, pendidikan tinggi tidak hanya menciptakan tenaga kerja, tetapi juga membuka jalur mobilitas vertikal.

Goldthorpe (2002) menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan kelas sosial. Pendidikan berfungsi sebagai filter meritokratis, di mana individu dengan kemampuan dan kualifikasi tertentu dapat menembus struktur kelas sosial yang lebih tinggi. Namun, hal ini hanya berlaku apabila sistem sosial benar-benar meritokratis, yakni menilai prestasi berdasarkan kemampuan, bukan asal-usul sosial. Fenomena ini terlihat pula di Indonesia. Lulusan perguruan tinggi umumnya memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di sektor formal dengan penghasilan lebih tinggi dibanding lulusan SMA atau SMP (Pattinasarany, 2012). Namun, tidak semua lulusan mampu menikmati ~~keuntungan ini karena adanya disparitas mutu perguruan tinggi. Lulusan universitas ternama lebih mudah~~

Hambatan Dalam Pengembangan Desa Wisata Seribu Menhir Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan
Kabupaten Lima Puluh Kota

mendapatkan pekerjaan bergengsi, sementara lulusan perguruan tinggi swasta kecil sering kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai bidangnya.

Pendidikan tinggi juga memberi efek non-ekonomi dalam mobilitas sosial. Lulusan perguruan tinggi cenderung memiliki jejaring sosial lebih luas, status sosial lebih dihormati, serta akses ke sumber daya politik dan ekonomi (Haveman & Smeeding, 2006). Dengan kata lain, pendidikan tinggi membuka ruang mobilitas tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam dimensi sosial dan politik. Namun, globalisasi mengubah peran pendidikan tinggi. Gelar sarjana tidak lagi otomatis menjamin pekerjaan dan status sosial tinggi. Brown, Lauder, & Ashton (2011) menyebut fenomena ini sebagai global auction, di mana lulusan universitas dari berbagai negara bersaing dalam pasar tenaga kerja global. Akibatnya, pendidikan tinggi tetap menjadi jalur mobilitas sosial, tetapi dengan persyaratan tambahan berupa keterampilan teknologi, bahasa, dan adaptabilitas. Dengan demikian, pendidikan tinggi dapat dilihat sebagai jalur mobilitas sosial yang penting, tetapi perannya semakin kompleks. Selain gelar akademik, faktor mutu institusi, relevansi kurikulum dengan pasar kerja, serta keterampilan tambahan sangat menentukan sejauh mana pendidikan tinggi benar-benar dapat meningkatkan mobilitas sosial.

Faktor Sosial-Ekonomi dalam Akses Pendidikan

Meskipun pendidikan tinggi berperan penting, akses terhadapnya masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki peluang lebih kecil melanjutkan pendidikan tinggi dibandingkan anak-anak dari keluarga kaya (Shapiro & Willen, 2005). Ketimpangan ini menjadikan pendidikan tinggi lebih mudah diakses oleh kelompok menengah ke atas, sehingga fungsi pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial menjadi terbatas. Raymond Boudon (1974) melalui konsep Inequality of Educational Opportunity (IEO) menegaskan bahwa capaian pendidikan individu sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga kaya memiliki sumber daya finansial, dukungan akademik, dan lingkungan belajar yang lebih baik, sehingga lebih mudah mencapai pendidikan tinggi. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan biaya, kualitas sekolah rendah, serta kurangnya dukungan akademik.

Selain itu, konsep Inequality of Social Opportunity (ISO) menjelaskan bahwa capaian status sosial juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial. Meskipun seseorang berhasil memperoleh gelar pendidikan tinggi, status sosial yang diraih tidak selalu lepas dari pengaruh jaringan sosial dan modal budaya keluarga. Hal ini menjelaskan mengapa mobilitas sosial di negara-negara berkembang cenderung lambat meskipun akses pendidikan tinggi semakin luas (Gao, 2011). Di Indonesia, ketimpangan sosial-ekonomi tercermin dalam data Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi. BPS (2017) mencatat bahwa APK perguruan tinggi hanya 20,89%, dengan mayoritas mahasiswa berasal dari keluarga menengah ke atas. Mahasiswa dari keluarga miskin seringkali berhenti kuliah karena kendala biaya meskipun memiliki kemampuan akademik.

Disparitas juga terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perguruan tinggi berkualitas umumnya terkonsentrasi di kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Akibatnya, anak-anak dari daerah terpencil menghadapi hambatan geografis dan finansial yang membuat mereka sulit melanjutkan kuliah (Moeliodihardjo, 2013). Hal ini memperlebar jurang ketimpangan antara kota dan desa. Selain ekonomi dan geografi, faktor kultural juga berpengaruh. Dalam beberapa komunitas, pendidikan tinggi belum dipandang penting terutama bagi perempuan. Pandangan tradisional ini membuat akses pendidikan tinggi semakin timpang berdasarkan gender dan budaya (Iannelli & Peterson, 2007). Dengan demikian, faktor sosial-ekonomi, geografi, dan budaya berperan besar dalam menentukan akses pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi baru bisa berfungsi optimal sebagai sarana mobilitas sosial apabila hambatan-hambatan struktural ini diminimalisasi melalui kebijakan afirmatif, seperti beasiswa, subsidi pendidikan, dan pembangunan perguruan tinggi di daerah tertinggal.

Mobilitas Sosial di Indonesia

Studi empiris di Indonesia menunjukkan adanya korelasi positif antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial. Penelitian Pattinasarany (2012) di Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan tinggi memiliki peluang mobilitas vertikal lebih besar dibanding mereka yang hanya berpendidikan dasar atau menengah. Responden berpendidikan perguruan tinggi memiliki peluang 46,1% lebih tinggi untuk naik kelas sosial. Namun, korelasi ini tidak berarti semua lulusan perguruan tinggi otomatis naik status sosial. Mobilitas sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Anak-anak dari keluarga kaya tidak hanya lebih mudah masuk universitas, tetapi juga lebih mudah memperoleh pekerjaan bergengsi karena memiliki jaringan sosial yang kuat (Brown et al., 2001).

Data BPS memperlihatkan bahwa partisipasi pendidikan tinggi masih rendah dibandingkan pendidikan dasar dan menengah. APK pendidikan tinggi tahun 2015 hanya 20,89%, jauh di bawah APK SD (109,94%) dan SMA (77,39%). Rendahnya partisipasi ini menunjukkan masih adanya hambatan struktural dalam akses pendidikan tinggi, yang pada akhirnya membatasi mobilitas sosial masyarakat (BPS, 2017). Selain faktor ekonomi, disparitas geografis juga memengaruhi mobilitas sosial. Mahasiswa dari daerah terpencil menghadapi hambatan biaya transportasi, akses internet terbatas, dan kurangnya perguruan tinggi berkualitas di sekitar mereka. Hal ini memperlambat mobilitas sosial vertikal di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan (Moeliodihardjo, 2013). Mobilitas sosial juga dipengaruhi oleh gender. Meski jumlah perempuan di perguruan tinggi meningkat, mereka masih menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja. Penelitian Iannelli & Peterson (2007) menunjukkan bahwa lulusan perempuan seringkali mendapat pekerjaan dengan upah lebih rendah dibanding laki-laki meskipun memiliki kualifikasi setara.

Globalisasi turut memperumit situasi. Brown, Lauder, & Ashton (2011) menyatakan bahwa kepemilikan ijazah tidak lagi menjamin mobilitas sosial karena pasar kerja global semakin kompetitif. Di Indonesia, banyak lulusan perguruan tinggi menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, meskipun pendidikan tinggi berkontribusi terhadap mobilitas sosial, peranannya masih terbatas oleh ketimpangan struktural, disparitas geografis, diskriminasi gender, serta tantangan globalisasi. Untuk meningkatkan mobilitas sosial, diperlukan kebijakan yang menasar kelompok rentan agar dapat menikmati manfaat pendidikan tinggi.

Tantangan dan Kebijakan

Tantangan utama pendidikan tinggi di Indonesia adalah tingginya biaya kuliah. Banyak keluarga miskin tidak mampu membiayai anaknya masuk universitas. Meskipun pemerintah menyediakan beasiswa Bidikmisi (kini KIP Kuliah), jumlah penerima masih terbatas dibandingkan kebutuhan (Kemendikbud, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi perlu diperluas agar pendidikan tinggi lebih inklusif. Tantangan kedua adalah ketidakmerataan kualitas perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri ternama di kota besar mendominasi kualitas, sementara perguruan tinggi swasta kecil seringkali menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga dosen, dan akreditasi. Kondisi ini menciptakan kesenjangan mutu yang berdampak pada peluang mobilitas sosial lulusan. Tantangan ketiga adalah relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri, sehingga menimbulkan fenomena pengangguran intelektual. Fenomena ini mengurangi peran pendidikan tinggi sebagai sarana mobilitas sosial karena gelar akademik tidak berbanding lurus dengan peluang kerja.

Globalisasi juga menjadi tantangan. Persaingan kerja tidak hanya antar lulusan dalam negeri, tetapi juga dengan tenaga kerja asing. Hal ini menuntut perguruan tinggi di Indonesia meningkatkan kualitas agar lulusannya mampu bersaing di tingkat internasional. Peningkatan kualitas ini meliputi penguasaan teknologi, kemampuan bahasa asing, dan soft skills yang relevan (OECD, 2019). Dalam konteks kebijakan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti pembangunan perguruan tinggi di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), peningkatan akreditasi perguruan tinggi, dan beasiswa LPDP. Namun, efektivitas program ini masih perlu evaluasi mendalam agar benar-benar mendorong mobilitas sosial bagi kelompok miskin dan daerah terpencil.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain memperluas beasiswa berbasis afirmasi untuk kelompok miskin, meningkatkan kerja sama antara perguruan tinggi dan industri, serta memperkuat pendidikan vokasi sebagai alternatif mobilitas sosial. Pendidikan vokasi terbukti efektif di banyak negara dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai yang berdaya saing (Psacharopoulos & Patrinos, 2004). Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan tinggi di Indonesia berpotensi menjadi sarana mobilitas sosial yang lebih inklusif. Namun, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara merata di seluruh wilayah.

Kesimpulan

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mendorong mobilitas sosial di Indonesia, namun peran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, geografis, dan kultural. Konsep Inequality of Educational Opportunity (IEO) dan Inequality of Social Opportunity (ISO) dari Boudon menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dapat menghambat tercapainya mobilitas sosial meskipun akses pendidikan tersedia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerataan akses melalui kebijakan beasiswa dan subsidi, peningkatan mutu perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja global, pengurangan

ketimpangan sosial-ekonomi lewat kebijakan redistribusi, serta pembangunan perguruan tinggi di wilayah terpencil untuk mengurangi disparitas geografis. Jika kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten, pendidikan tinggi di Indonesia akan mampu berfungsi sebagai instrumen utama pembangunan sekaligus sarana mobilitas sosial yang inklusif..

Referensi

- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Boudon, R. (1974). *Education, Opportunity, and Social Inequality*. Wiley.
- Brown, G., Halsey, A. H., Heath, A. F., & Ridge, J. M. (2001). *Social Class and Educational Opportunity*. Routledge.
- Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. (2011). *The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs, and Incomes*. Oxford University Press.
- Burlutskaia, L. (2014). Higher education and social mobility. *Journal of Social Policy Studies*, 12(3), 45–61.
- Checchi, D. (2004). *The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality*. Cambridge University Press.
- Coleman, J. S., et al. (1966). *Equality of Educational Opportunity*. U.S. Government Printing Office.
- Dale, R. (2015). Social origins and mobility: An international perspective. *Comparative Education Review*, 59(3), 367–390.
- Gao, W. (2011). Education and inequality in contemporary society. *Social Science Research*, 40(3), 563–575.
- Goldthorpe, J. H. (2002). Education-based meritocracy: The barriers of social origin. *British Journal of Sociology*, 53(4), 463–481.
- Haveman, R., & Smeeding, T. (2006). The role of higher education in social mobility. *The Future of Children*, 16(2), 125–150.
- Iannelli, C., & Peterson, R. (2007). Education and social mobility in Europe. *European Societies*, 9(3), 443–468.
- Mok, K. H. (2016). Massification of higher education, social stratification and social mobility in the new economy: The case of Hong Kong. *Journal of Education and Work*, 29(1), 14–35.
- Moeliodihardjo, B. Y. (2013). Higher education and inequality in Indonesia. *Indonesian Journal of Education*, 1(2), 33–47.
- OECD. (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. OECD Publishing.

-
- Pattinasarany, D. (2012). Pendidikan, ketimpangan sosial, dan mobilitas sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 17(1), 23–48.
- Psacharopoulos, G. (1994). Returns to investment in education: A global update. *World Development*, 22(9), 1325–1343.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. (2004). Returns to investment in education: A further update. *Education Economics*, 12(2), 111–134.
- Shapiro, T. M., & Willen, S. (2005). *Social Stratification and Mobility in the 21st Century*. Pine Forge Press.
- Young, M. (1990). *The Rise of the Meritocracy*. Transaction Publishers.